

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



SEKRETARIS BADAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketalaksanaan dan kepustakaan Badan ;
- e. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Badan ;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan;
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

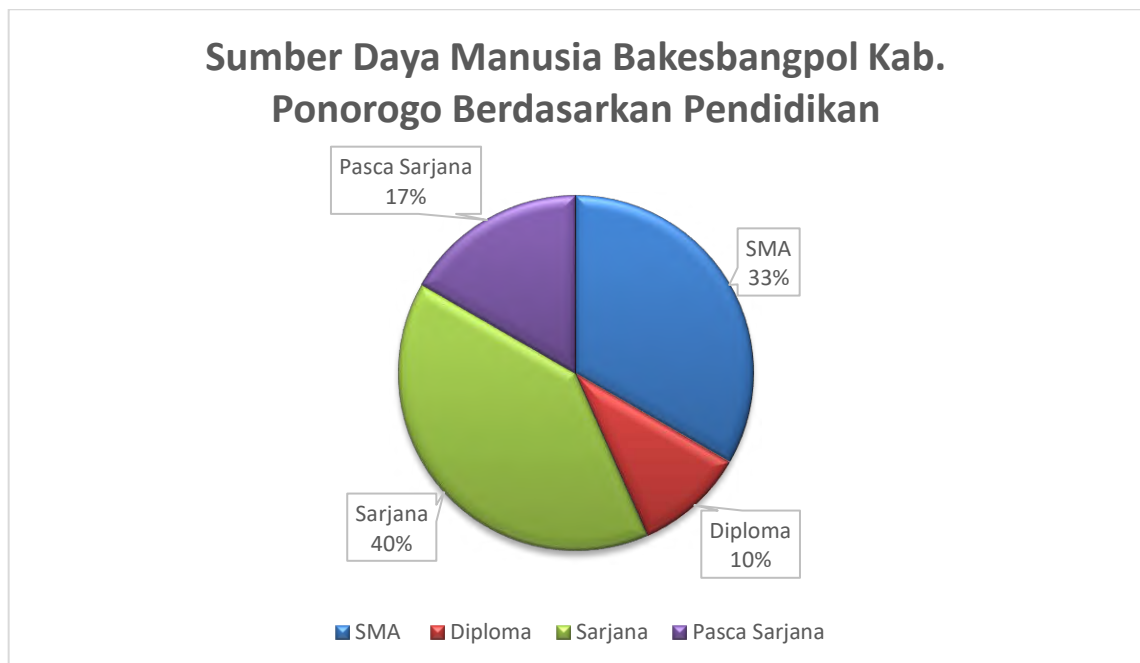
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



C. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretaris sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kerja Sekretaris Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Reviu Perjanjian Kinerja
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP	95%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP	95%	95%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Indikator Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang sesuai SOP capaian kinerjanya 95% masuk kategori **Berhasil**. Administrasi perkantoran yang sesuai SOP dimaksud adalah administrasi perkantoran telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang bagus, dukungan data yang lengkap dan benar, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan koordinasi yang baik serta dukungan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang sistematis dan komprehensif ;
2. Meningkatkan sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menggunakan

metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung)
	<p>Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dan Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertahankan.</p>

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

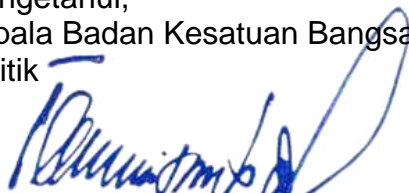
Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja Tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria **Berhasil** (95%).

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk pelaksanaan kinerja lebih baik perlu langkah :

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya agar berpedoman pada laporan kinerja tahun sebelumnya sehingga kinerja dapat ditingkatkan lagi ;
2. Untuk kegiatan yang belum dapat tercapai target dan sarannya diperlukan upaya lebih lanjut agar pencapaiannya dapat dimaksimalkan pada tahun yang akan datang.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik



Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025
Sekretaris Bakesbangpol



Bambang Windusancoyo, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP 196906271989031001

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



**KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

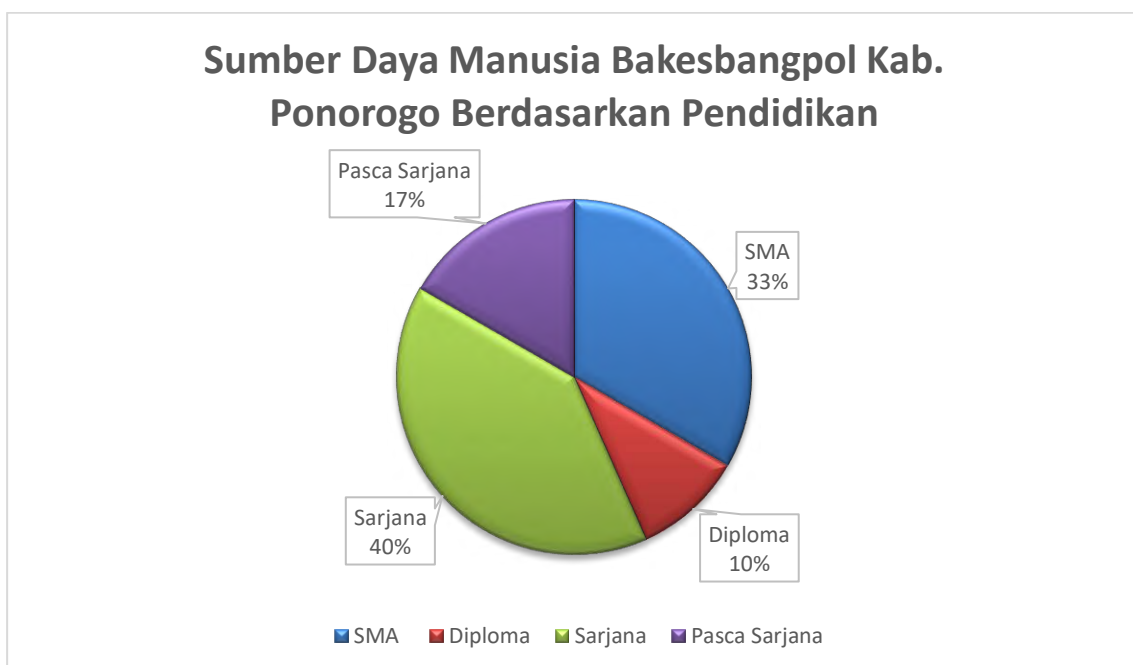
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



C. Sumber Daya Manusia (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%
		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan indikator yang harus dicapai adalah Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 100% pada tahun 2025. Capaian atas target tersebut adalah 100% masuk kategori **Berhasil**.

Sedangkan indikator kedua sasaran tersebut adalah Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan dengan target 100% pada tahun 2025. Capaian atas target tersebut adalah 100% masuk kategori **Berhasil**.

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Purna Paskibraka Indonesia (PPI), serta instansi yang terkait dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah meningkatkan upaya cegah dini terjadinya konflik melalui :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo
2. Mengintensifikan dialog konstruktif didalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM);
3. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006;
4. Terus mendukung baik FKUB, Forum Komunikasi Aliran Kepercayaan, Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) untuk mengejawantahkan toleransi dalam kegiatan nyata
5. Melaksanakan peran aktif Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di masyarakat terutama di kalangan generasi muda.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung) <i>Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dgn Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertanyakan.</i>

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

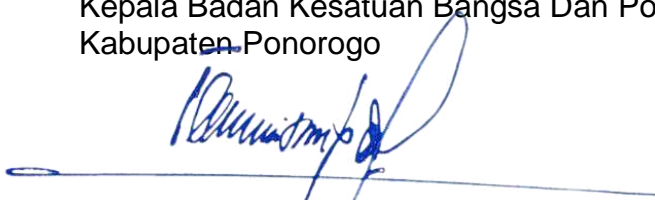
Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025, capaian kinerja indikator kinerja dengan kriteria **Berhasil** (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama sesuai dengan rencana tindak lanjut.

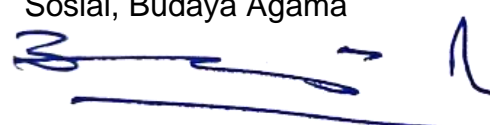
Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya Agama


Bambang Hermawan, S.E.
Pembina
NIP 197603052002121005

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan perencanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa ; dan
- e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

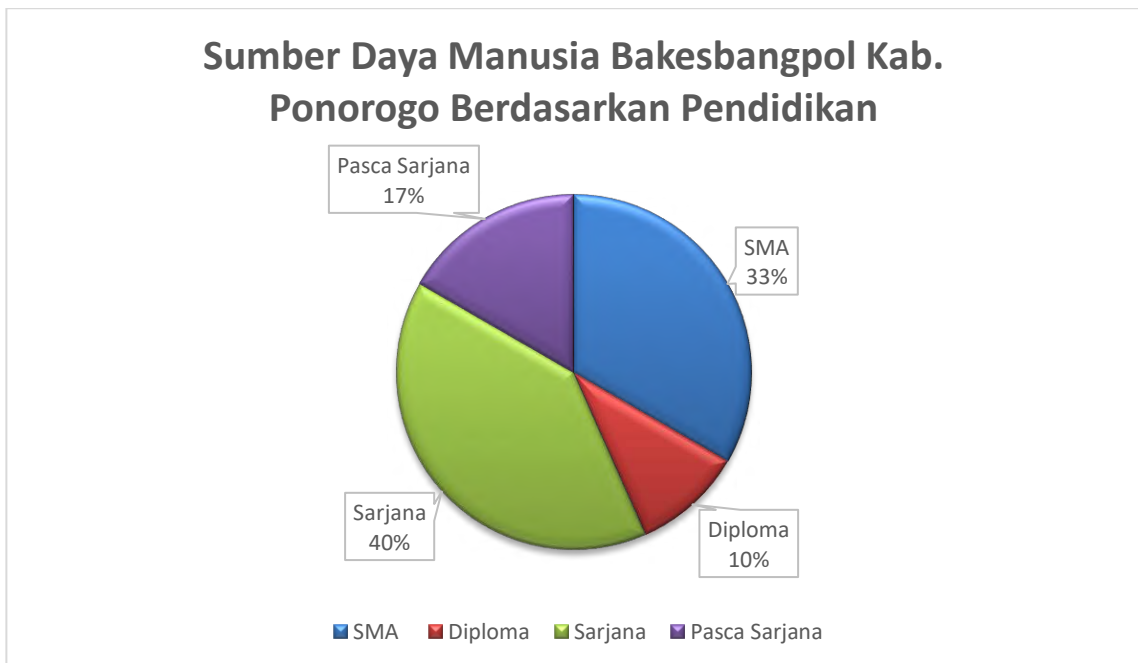
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



C. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan memiliki indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan dengan target 100%. Capaian target tersebut pada tahun 2025 mencapai 100% maka masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan instansi lain yang mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah meningkatkan upaya cegah dini terjadinya konflik melalui :

1. Mengefektifkan kinerja Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebagai penggali informasi intelejen;
2. Pembentukan Tim pelaksana koordinasi penanganan konflik sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015);
3. Merevitalisasi keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

4. Merevitalisasi keberadaan Forum Komunikasi Pencak Silat Dan Beladiri (FKPSB);
5. Meningkatkan peran sinergitas Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi timbulnya konflik. Informasi yang cepat dan akurat untuk dilaporkan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung)
	<p>Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dgn Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertanyakan.</p>

BAB III PENUTUP

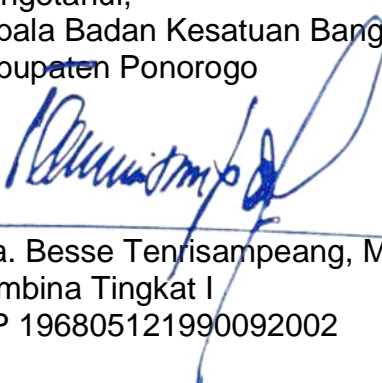
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

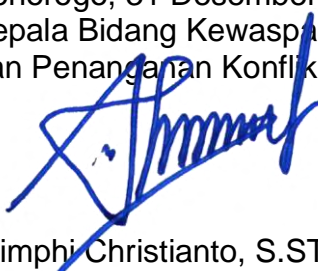
Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025, capaian kinerja indikator kinerja dengan kriteria **Berhasil** (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja di Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana tindak lanjut.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik


Wimphi Christianto, S.STP.
Pembina
NIP 197902251999121001

LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan peningkatan hubungan partai politik, fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

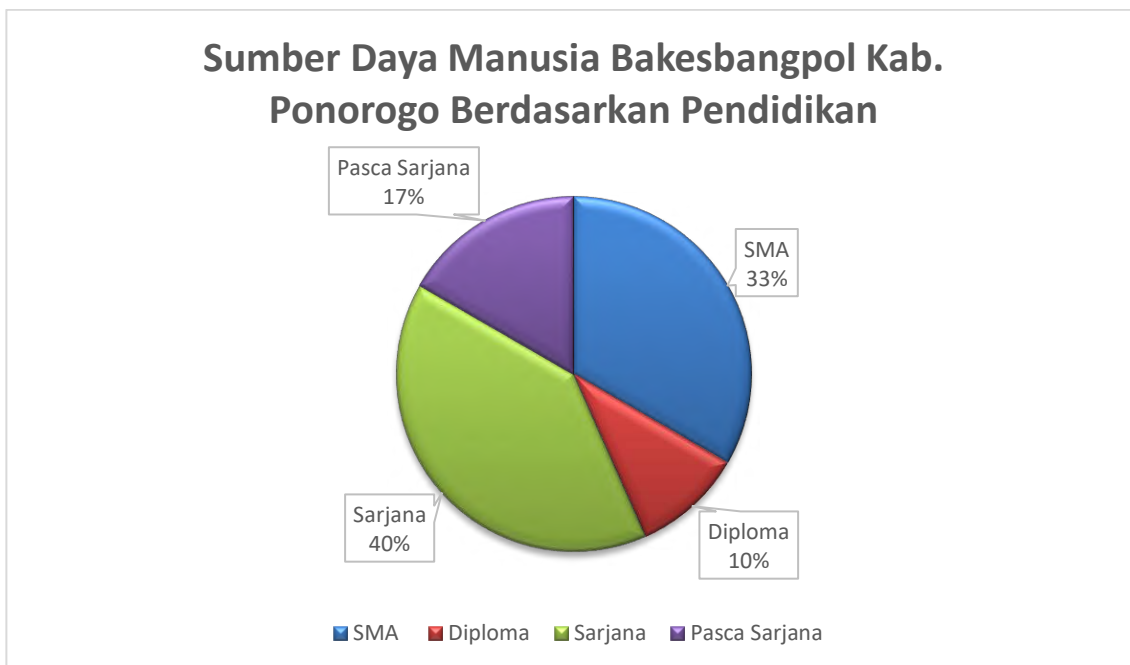
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



C. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Prosentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Prosentase Pencairan Hibah kepada Ormas Penerima Hibah	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil

2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%	100%
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Pencairan Hibah kepada Ormas Penerima Hibah	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran meningkatnya etika dan budaya politik memiliki indikator kinerja persentase pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan memiliki target 100%. Capaian tahun 2025 terhadap target tersebut adalah 100% dan masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan pengurus Partai Politik serta adanya komitmen yang tinggi dari semua jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

Sasaran meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan memiliki indikator persentase pencairan hibah kepada ormas penerima hibah memiliki target 100% dan masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan ormas penerima hibah serta adanya komitmen yang tinggi dari semua jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

1. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurus Parpol Dalam rangka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;
2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan;
3. Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota, maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota, maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta pengalaman penelitian yang relevan dengan pengukuran indikator demokrasi. Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah daerah dapat memperoleh pendampingan dalam memahami konsep, dimensi, dan indikator IDI secara lebih komprehensif, meskipun belum terdapat juknis resmi dari pemerintah pusat untuk tingkat kabupaten/kota. Asistensi yang diberikan oleh akademisi dapat mencakup penyusunan kerangka pengukuran internal, pemetaan indikator IDI yang relevan dengan kewenangan kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat melakukan pengukuran dan evaluasi kondisi demokrasi secara terarah sebagai bahan perbaikan kebijakan, tanpa harus menunggu kebijakan formal dari pusat.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sosial Politik menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung)
	<p>Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dgn Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertanyakan.</p>

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian rata-rata realisasi kinerja tahun 2025, sebesar (100%) masuk kategori **Berhasil**.

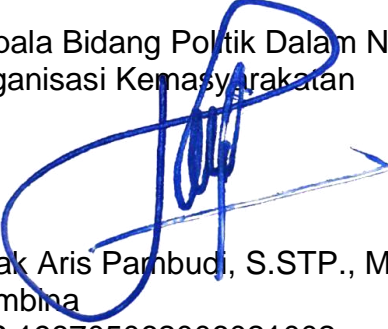
Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja di Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan rencana tindak lanjut.

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan


Jajak Aris Pambudi, S.STP., M.Si
Pembina
NIP 198705062006021002